Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

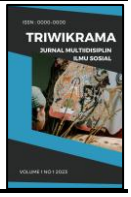

RELASI NEGARA, OLIGARKI, DAN PEMBANGUNAN NASIONAL: ANALISIS KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Wichdahtul Aufa Qorina, Hendri Irawan S.PD., M. Kesos
Universitas Indraprasta PGRI

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

wichdahqorina@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara negara dan oligarki dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui perspektif ekonomi politik. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat daya saing bangsa. Namun, dalam praktiknya pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari pengaruh kelompok oligarki yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki peran sentral sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pelaksana kebijakan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, kelompok oligarki memanfaatkan kekuatan ekonomi dan jaringan politik untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan sehingga pembangunan cenderung lebih menguntungkan kelompok elite dibandingkan masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai dampak, seperti ketimpangan distribusi manfaat pembangunan, konflik agraria, marginalisasi masyarakat terdampak, serta meningkatnya dominasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: negara, oligarki, pembangunan infrastruktur, ekonomi politik, kebijakan publik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between the state and oligarchy in Indonesia's infrastructure development policies from a political economy perspective. Infrastructure development has become one of the government's main priorities to promote national economic growth, improve interregional connectivity, and strengthen the country's competitiveness. However, in practice, infrastructure development cannot be separated from the influence of oligarchic groups that possess significant economic resources and political power. This research employs a qualitative research method with a descriptive-analytical approach. The data used are secondary data obtained from books, scholarly journals, scientific articles, and previous studies relevant to the research topic. The findings indicate that the state plays a central role as a regulator, facilitator, and implementer

of infrastructure development policies. On the other hand, oligarchic groups utilize their economic power and political networks to influence the policymaking process, resulting in development policies that tend to benefit elite groups more than society as a whole. This situation has led to several consequences, including unequal distribution of development benefits, agrarian conflicts, the marginalization of affected communities, and the increasing dominance of economic interests in public policy. Therefore, strengthening transparent and accountable governance, as well as enhancing public participation, is essential to ensure that infrastructure development is carried out in a fair, inclusive, and welfare-oriented manner.

***Keywords**: state, oligarchy, infrastructure development, political economy, public policy.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa, menjembatani hubungan antar daerah, serta memperkuat kemampuan ekonomi Indonesia dalam bersaing. Sejak masa kepemimpinan Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama negara melalui berbagai program seperti jalan tol, pelabuhan, bendungan, bandara, kereta api, hingga Proyek Strategis Nasional (PSN). Negara berperan penting dengan memberikan aturan, dana, pengosongan lahan, serta bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan proyek pembangunan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, pembangunan infrastruktur dijadikan alat utama untuk mendorong perubahan ekonomi nasional. Secara teoritis, membangun infrastruktur dianggap bisa meningkatkan efisiensi ekonomi, mempercepat pergerakan barang dan jasa, serta membantu meratakan pembangunan di berbagai daerah. Namun, di lapangan, pembangunan infrastruktur di Indonesia tetap terkait erat dengan hubungan kekuasaan antara pemerintah, para elit politik, dan kalangan oligarki ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi politik, kebijakan pembangunan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok-kelompok elite yang memiliki kemampuan untuk mengakses kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, negara tidak selalu bersikap netral sebagai wakil dari kepentingan masyarakat umum, tetapi bisa menjadi tempat berkembangnya kesepakatan dan kerja sama antara para pemain politik serta pemilik modal.

Fenomena itu terjadi dalam berbagai proyek pembangunan besar yang menunjukkan tanda-tanda bahwa kelompok oligarki mendominasi dalam pengambilan keputusan pembangunan. Penelitian Luthfi Hasanal Bolqiah dan Riaty Raffiuddin dalam jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education menyebutkan bahwa proyek reklamasi pesisir utara Jakarta menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara kelompok elite pemerintah dan kelompok bisnis oligarki sejak masa Orde Baru sampai masa reformasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa kelompok oligarki bisa tetap memiliki pengaruhnya dengan menjalin hubungan dekat dengan para pemimpin politik, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari berbagai proyek

pembangunan. Selain itu, praktik oligarki dalam pembangunan juga terjalin dalam proses pengalihan kekuasaan dan pengendalian proyek pembangunan di daerah. Penelitian oleh La Husen Zuada dan timnya dalam Jurnal Penelitian Politik mengungkapkan bahwa di wilayah seperti Wakatobi, para elite politik dan ekonomi berubah menjadi kelompok oligarki yang memakan korban, mengendalikan berbagai proyek pembangunan serta sektor ekonomi penting. Kondisi itu memang mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi baru, namun di sisi lain juga menyebabkan ketimpangan pendapatan, konflik penggunaan lahan, serta marginalisasi masyarakat setempat.

Dalam konteks nasional, pembangunan infrastruktur juga menyebabkan masalah ketidakseimbangan dalam pembagian kesejahteraan. Penelitian oleh Muhammad Fakhrur Rodzi yang terbit di Jurnal Masyarakat dan Desa menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia belum mampu menciptakan kesetaraan ekonomi secara merata. Infrastruktur masih terpusat di daerah tertentu dan lebih menguntungkan kelompok yang punya modal dan akses ke politik. Penelitian itu menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia lebih banyak berjalan sesuai dengan arah liberalisasi ekonomi yang didominasi oleh kelompok berkuasa dan pemilik modal, sehingga manfaat dari pembangunan tersebut belum dirasakan secara merata oleh masyarakat secara keseluruhan.

Kajian tentang oligarki di Indonesia juga semakin kuat didukung oleh pemikiran Jeffrey A. Winters, Vedi R. Hadiz dan Richard Robison menjelaskan bahwa setelah reformasi, oligarki di Indonesia tidak menghilang, melainkan berusaha menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi. Dalam pandangan mereka, demokrasi Indonesia justru menjadi ruang baru bagi elite ekonomi untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya terhadap kebijakan negara, termasuk dalam sektor pembangunan infrastruktur. Selain itu, proyek pembangunan infrastruktur yang besar sering kali menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti konflik mengenai tanah, pindahnya warga, gangguan terhadap lingkungan, serta ketidakseimbangan dalam akses terhadap kemajuan ekonomi. Dalam banyak situasi, masyarakat setempat seringkali memiliki kemampuan untuk menegosiasi yang kurang dibandingkan pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan dan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari kebijakan pembangunan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran negara dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia?
2. Bagaimana relasi antara negara dan oligarki terbentuk dalam kebijakan pembangunan infrastruktur nasional?
3. Bagaimana pengaruh oligarki terhadap arah implementasi Pembangunan infrastruktur di Indonesia.

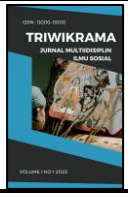

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran negara dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
2. Untuk mengkaji relasi antara negara dan oligarki dalam proses pembentukan kebijakan pembangunan infrastruktur nasional.
3. Untuk menganalisis pengaruh oligraki terhadap arah dan implementasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.
4. Untuk memahami bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur mencerminkan relasi kekuasaan antara negara, elite ekonomi, dan kepentingan Masyarakat.
5. Untuk Mengetahui dampak keterlibatan oligarki dalam pembangunan infrastruktur terhadap diistribusi kesejahteraan Masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Negara Dalam Pembangunan Nasional

Negara berperan penting dalam proses pembangunan nasional karena memiliki wewenang dalam menyusun kebijakan, mengatur penyebaran sumber daya, serta menentukan arah pembangunan bidang ekonomi dan sosial. Dari sudut pandang negara dalam tahap perkembangan, negara dianggap memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara menerapkan kebijakan tertentu dan membangun sarana serta fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai cara penting untuk meningkatkan hubungan antar wilayah, mempercepat masuknya investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Namun, dari sudut pandang ekonomi politik, negara tidak selalu dianggap sebagai lembaga yang netral. Negara sering kali menjadi tempat bertarungnya kepentingan dari para pejabat politik, pemilik uang, dan masyarakat. Richard Robison menjelaskan bahwa sejak masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi karena kerja sama yang sangat erat antara pemerintah dengan kelompok kapital besar yang mendapatkan kesempatan khusus dalam mengambil kebijakan ekonomi negara. Hubungan tersebut menciptakan cara kerja kekuasaan yang memungkinkan para pemilik modal mempengaruhi secara besar dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

Vedi R. Hadiz dan Richard Robison juga menyebutkan bahwa setelah Reformasi, kekuasaan para oligarki di Indonesia tidak hilang sepenuhnya, tetapi mereka tetap ada dan mengalami perubahan organisasi melalui sistem demokrasi serta mekanisme pasar. Demokrasi justru menjadi sarana baru bagi para pemimpin ekonomi untuk tetap memengaruhi keputusan pemerintah dan arah pembangunan negara.

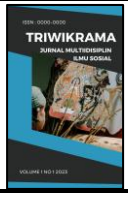

2. Teori Oligarki

Konsep oligarki digunakan untuk menjelaskan cara kelompok kecil yang kaya dan berkuasa memengaruhi keputusan pemerintah dan kebijakan umum. Jeffrey A. Winters dalam buku Oligarchy menjelaskan oligarki sebagai sistem pemerintahan yang dipegang oleh seseorang atau kelompok tertentu yang memilki banyak harta benda. Mereka menggunakan kekayaan tersebut untuk mempertahankan kepentingan mereka sendiri. Menurut Winters, ketimpangan ekonomi bisa menyebabkan ketimpangan politik karena kelompok yang kaya punya lebih banyak kekuatan untuk memengaruhi pemerintah, hukum, dan kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, oligarki tumbuh kuat sejak masa Orde Baru karena adanya hubungan saling menguntungkan antara pejabat politik dan pengusaha besar. Setelah reformasi tahun 1998, kelompok oligarki tidak hancur, malah mereka beradaptasi dengan sistem demokrasi dengan menguasai partai politik, media, dan jaringan ekonomi. Jeffrey Winters juga menjelaskan bahwa lemahnya institusi hukum dan rendahnya kontrol masyarakat sipil menyebabkan oligarki di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap proses politik dan kebijakan pembangunan. Kondisi tersebut membuat kebijakan negara sering kali lebih mencerminkan kepentingan elite ekonomi dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

3. Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif Ekonomi Politik

Pembangunan infrastruktur adalah bagian yang sangat penting dalam strategi pembangunan negara di Indonesia. Pemerintah fokus pada pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan kawasan industri sebagai hal yang utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan bersaing bangsa. Infrastruktur dianggap bisa mempercepat pengiriman barang dan jasa, menarik investor, serta menciptakan kesempatan kerja. Namun, dari sudut pandang ekonomi politik, pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan cara kekuasaan didistribusikan serta kepentingan-kepentingan yang ada dalam bidang ekonomi dan politik. Proyek pembangunan infrastruktur yang besar biasanya membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan besar yang tertarik pada proyek tersebut.

mengenai oligarki di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sering menjadi arena akumulasi modal bagi elite ekonomi. Sunardi menjelaskan bahwa oligarki di Indonesia berkembang melalui dominasi kapital terhadap kebijakan negara, termasuk dalam kebijakan pembangunan dan investasi nasional. Kondisi ini menyebabkan pembangunan infrastruktur berpotensi lebih menguntungkan kelompok elite dibandingkan masyarakat secara luas. Selain itu, berbagai proyek pembangunan nasional juga menyebabkan berbagai masalah seperti konflik lahan, pindahnya masyarakat, ketimpangan dalam pembagian manfaat pembangunan, dan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Dalam banyak kasus, masyarakat setempat sering kali kurang memiliki kemampuan untuk menegosiasikan atau melawan kebijakan dan proyek yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan besar. Ini menunjukkan bahwa pembangunan

infrastruktur tidak bisa dipisahkan dari hubungan kekuasaan antara pemerintah, kalangan oligarki, dan masyarakat.

4. Relasi Negara, Oligarki, dan Kebijakan Infrastruktur di Indonesia

Hubungan antara negara dan kelompok orang yang kaya dalam membangun sarana dan prasarana menunjukkan adanya keterkaitan antara kekuatan pemerintahan dan kekuatan uang. Negara membutuhkan investasi dan bantuan uang agar bisa mengerjakan proyek pembangunan negara, sementara kelompok oligarki menginginkan akses ke kebijakan pemerintah untuk mengembangkan kepentingan ekonominya. Dalam konteks Indonesia, hubungan ini terlihat dari peran para pengusaha besar dalam proyek-proyek penting nasional, pendanaan pembangunan, serta pengaruh para tokoh bisnis terhadap proses politik. Jeffrey Winters menyebutkan bahwa oligarki di Indonesia mampu memengaruhi kebijakan pemerintah karena kekayaan terpusat di tangan sedikit orang dan lemahnya sistem hukum. Vedi Hadiz dan Richard Robison juga menegaskan bahwa demokrasi pasca-Reformasi belum mampu menghapus dominasi elite ekonomi dalam proses pembangunan nasional. Sebaliknya, sistem demokrasi justru menjadi sarana bagi oligarki untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya terhadap kebijakan publik.

METODOLOGI PENULISAN

A. Jenis Penulisan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan politik secara mendalam, khususnya mengenai relasi antara negara, oligarki, dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi memengaruhi proses perumusan maupun implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur nasional. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena pembangunan infrastruktur di Indonesia serta menganalisis hubungan antara negara dan oligarki dalam kebijakan pembangunan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta dan data yang ditemukan, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap dinamika kekuasaan yang terjadi dalam proses pembangunan nasional.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi politik. Menggunakan pendekatan ekonomi politik membantu memahami bagaimana kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, dan kebijakan pembangunan negara saling terkait satu sama lain. Dari sudut pandang ekonomi politik, membangun infrastruktur tidak hanya dianggap sebagai cara meningkatkan perekonomian, tetapi juga menjadi tempat adu kekuatan antara pemerintah, para pemimpin politik, dan kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh besar di bidang ekonomi. Dengan pendekatan ini, penelitian akan melihat cara pemerintah melakukan tugasnya dalam membangun infrastruktur, bagaimana

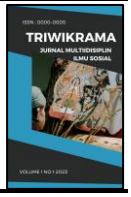

pengaruh kelompok oligarki terhadap kebijakan pembangunan, serta bagaimana manfaat dari pembangunan itu didistribusikan kepada masyarakat. Pendekatan ekonomi politik digunakan untuk melihat hubungan antara kekuasaan, modal, dan kebijakan pemerintah dalam proses pembangunan negara Indonesia.

C. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, seperti:

- Buku ilmiah mengenai negara, oligarki, dan ekonomi politik;
- Jurnal nasional dan internasional;
- Artikel ilmiah;
- Hasil penelitian terdahulu;

D. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber diseleksi dan difokuskan sesuai dengan tema penelitian, yaitu relasi negara, oligarki, dan pembangunan infrastruktur. Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar memudahkan proses analisis. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang kritis mengenai bagaimana relasi antara negara dan oligarki memengaruhi kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia serta dampaknya terhadap masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Peran Negara dalam Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Negara memainkan peran penting dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah bertugas sebagai pengatur, penyusun kebijakan, pihak yang memudahkan investasi, serta pengendali arah pembangunan negara. Melalui berbagai kebijakan seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan jalan tol, pelabuhan, bendungan, kawasan industri, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah menunjukkan kemampuan dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan ekonomi nasional. Dari sudut pandang negara berkembang, pembangunan infrastruktur dianggap sebagai alat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemampuan bersaing bangsa. Negara membangun infrastruktur agar hubungan antar wilayah lebih baik, proses pengiriman barang dan jasa lebih cepat, serta menarik investasi dari dalam negeri dan luar negeri. Namun, dari sudut pandang ekonomi politik, pembangunan infrastruktur tidak hanya dianggap sebagai kebijakan ekonomi saja, tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya hubungan kekuasaan antara pemerintah dan kelompok pemilik modal.

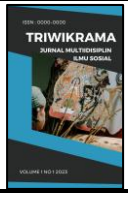

Richard Robison menjelaskan bahwa sejak era Orde Baru, pembangunan ekonomi Indonesia dibentuk melalui hubungan patronase antara negara dan pengusaha besar. Negara memberikan akses ekonomi dan perlindungan politik kepada kelompok bisnis tertentu sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan politik. Pola tersebut menciptakan ketergantungan antara elite politik dan elite ekonomi dalam proses pembangunan nasional. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya hilang setelah Reformasi 1998, tetapi justru mengalami reorganisasi melalui sistem demokrasi dan liberalisasi ekonomi. Menurut Vedi R. Hadiz dan Richard Robison dalam Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, oligarki di Indonesia tetap mampu mempertahankan pengaruhnya terhadap kebijakan negara melalui penguasaan sumber daya ekonomi dan jaringan politik. Demokrasi pasca-Reformasi justru membuka ruang baru bagi elite ekonomi untuk masuk ke dalam struktur kekuasaan negara dan memengaruhi arah pembangunan nasional.

B. Relasi Negara dan Oligarki dalam Kebijakan Infrastruktur

Hubungan antara pemerintah dan kalangan kelompok berkuasa dalam membangun sarana dan prasarana menunjukkan adanya ketergantungan timbal balik antara kekuasaan politik dan pengaruh keuangan. Negara memerlukan dana besar untuk mendanai proyek pembangunan negara, sedangkan kelompok oligarki membutuhkan kemudahan akses ke kebijakan pemerintah agar bisa memperluas kepentingan ekonominya. Jeffrey A. Winters dalam Oligarchy menjelaskan bahwa oligarki merupakan sistem di mana kelompok kecil yang memiliki kekayaan besar mampu mempertahankan dan memperluas pengaruhnya melalui kontrol terhadap institusi politik dan kebijakan negara. Menurut Winters, inti dari oligarki adalah *wealth defense* atau upaya mempertahankan kekayaan melalui pengaruh terhadap negara dan sistem hukum.

Dalam situasi Indonesia, hubungan ini terlihat dari peran perusahaan besar dalam berbagai proyek penting bagi negara. Negara memberikan banyak keuntungan seperti kemudahan dalam berinvestasi, izin penggunaan lahan, pendukung dari aturan-aturan pemerintah, serta kesempatan ikut dalam proyek-proyek besar kepada perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan para pejabat politik penting. Hal ini membuat pembangunan infrastruktur sering kali lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat secara umum. Penelitian Bolqiah dan Raffiuddin mengenai reklamasi Pantai Utara Jakarta menunjukkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari dominasi oligarki bisnis yang memiliki hubungan erat dengan elite pemerintah. Proyek reklamasi menjadi contoh bagaimana negara dan pemilik modal bekerja sama dalam pembangunan dengan orientasi ekonomi yang kuat. Dominasi korporasi besar dalam proyek tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional sering kali berada dalam kepentingan akumulasi modal kelompok elite. Selain itu, pembangunan IKN juga menunjukkan pola yang sama. Negara memberikan beberapa keuntungan kepada investor dan perusahaan besar untuk mendorong pembangunan kawasan ibu kota baru. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut tidak hanya menjadi tanda dari kemajuan pembangunan

negara, tetapi juga memberikan kesempatan ekonomi yang besar bagi para pengusaha dan investor yang terlibat dalam proyek tersebut.

C. Pengaruh Oligarki terhadap Implementasi Pembangunan Infrastruktur

Pengaruh oligarki terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur terlihat dari cara mengambil keputusan, cara mendistribusikan proyek pembangunan, serta cara mengendalikan sumber daya ekonomi. Kelompok oligarki bisa memengaruhi kebijakan pemerintah karena mereka punya uang banyak, teman-teman di dunia politik, dan bisa mengakses kekuasaan. Jeffrey Winters menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi akan menghasilkan ketimpangan politik karena kelompok kaya memiliki kapasitas lebih besar dalam memengaruhi kebijakan publik dibandingkan masyarakat biasa. Dalam sistem oligarki, negara cenderung berfungsi sebagai pelindung kepentingan pemilik modal melalui regulasi, aparat hukum, dan kebijakan pembangunan.

Dalam membangun infrastruktur di Indonesia, pengaruh dari kelompok oligarki terlihat dari cara perusahaan besar mendominasi proyek-proyek penting bagi negara. Banyak proyek pembangunan infrastruktur dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki koneksi kuat dengan para elite politik dan pihak berkuasa di negara tersebut. Hal ini membuat proses pembangunan lebih fokus pada keuntungan ekonomi daripada pada penyebaran kesejahteraan bagi masyarakat. Pengaruh dari oligarki juga bisa dilihat dari munculnya berbagai permasalahan agraria dan pemindahan penduduk yang terjadi karena pembangunan infrastruktur. Penelitian Yanis Maladi menyebutkan bahwa konflik agraria di Indonesia biasanya terjadi karena penguasaan lahan oleh pemerintah dan perusahaan yang cukup kuat. Dalam banyak kasus, masyarakat setempat sering kali merasa tidak memiliki kekuatan untuk berbicara atau memperjuangkan kepentingannya dibandingkan pemerintah dan perusahaan besar yang ikut dalam proyek pembangunan. Selain itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia juga menyebabkan ketimpangan dalam penyebaran manfaat pembangunan tersebut. Infrastruktur umumnya berkumpul di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menarik investor, sementara masyarakat di wilayah yang kurang berkembang masih belum merasakan manfaat dari pembangunan secara merata.

D. Dampak Relasi Negara dan Oligarki terhadap Pembangunan Nasional

Hubungan antara negara dan kelompok pemimpin yang berkuasa dalam membangun sarana penyambung kehidupan memengaruhi secara rumit perkembangan bangsa secara keseluruhan. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur berhasil meningkatkan hubungan antar wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menarik investasi dari dalam negeri serta luar negeri. Infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara dapat meningkatkan kemudahan dalam menggerakkan barang dan jasa serta memperkuat hubungan ekonomi di seluruh negeri. Namun, di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga membawa berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti ketimpangan dalam pembangunan, konflik mengenai penggunaan lahan, pengusiran masyarakat, serta

kerusakan terhadap lingkungan hidup. Kekuasaan kelompok-kelompok kekuatan besar dalam membuat kebijakan pembangunan membuat manfaat dari pembangunan tidak terbagi secara adil kepada seluruh masyarakat. Kelompok yang memiliki uang banyak mendapatkan untung besar dari proyek pembangunan, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki banyak uang sering kali hanya menjadi bagian dari proyek tersebut.

Dari sudut pandang ekonomi politik, situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan negara Indonesia masih dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan antara pemerintah dan kelompok oligarki. Negara masih belum bisa sepenuhnya menjadi wakil dari kepentingan rakyat karena pengaruh besar dari kelompok elite ekonomi dalam membuat kebijakan pembangunan negara. Menurut Winters, oligarki akan terus bertahan selama terdapat konsentrasi kekayaan yang tinggi dan lemahnya kontrol institusi demokrasi terhadap kekuatan modal. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang berkeadilan memerlukan transparansi kebijakan, penguatan kontrol masyarakat sipil, serta pembatasan dominasi oligarki terhadap negara dan kebijakan publik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kesimpulan tersebut, pembangunan infrastruktur di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan jalannya pembangunan negara melalui kebijakan, aturan, dana, dan pelaksanaan berbagai proyek yang penting bagi bangsa. Infrastruktur dipandang sebagai alat utama yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan hubungan antar wilayah, serta memperkuat kemampuan negara dalam bersaing secara nasional. Dengan membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, kawasan industri, serta proyek-proyek strategis lainnya, pemerintah ingin mempercepat proses modernisasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun dari sudut pandang ekonomi politik, membangun infrastruktur tidak hanya tentang kepentingan pembangunan ekonomi saja, tetapi juga tentang hubungan kekuasaan antara negara, kelompok elite, dan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan para pemimpin kecil terbentuk karena ada pengaruh saling memengaruhi antara kekuatan pemerintah dan kekuatan uang. Negara memerlukan bantuan dari investasi dan dana untuk mendorong pembangunan bangsa, sedangkan kelompok oligarki menginginkan kesempatan mengakses kebijakan pemerintah agar bisa menjaga dan memperluas keuntungan ekonominya.

Pengaruh oligarki terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur terlihat dari cara pengambilan keputusan, bagaimana proyek pembangunan didistribusikan, bagaimana sumber daya ekonomi dikendalikan, hingga bagaimana akses investasi diberikan kepada perusahaan besar. Kondisi itu membuat pembangunan infrastruktur sering kali lebih menguntungkan kelompok elite ekonomi-politik dibandingkan masyarakat umum. Kekuatan para oligarki dalam proses pembangunan juga menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti konflik soal tanah, pemaksaan warga keluar dari tempat tinggal mereka, ketidakseimbangan dalam penyebaran manfaat pembangunan, serta pengucilan kelompok

masyarakat setempat. Meskipun pembangunan infrastruktur memberikan manfaat positif seperti meningkatkan koneksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, manfaat dari pembangunan tersebut belum dirasakan sama rata oleh semua orang. Infrastruktur masih lebih banyak berkumpul di daerah yang memiliki nilai ekonomi besar dan menarik investor serta kelompok yang memiliki uang. Pembangunan nasional di Indonesia masih dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dan kepentingan ekonomi kelompok tertentu.

B. Saran

Pemerintah harus meningkatkan kejelasan dan tanggung jawab dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur. Transparansi diperlukan agar pembangunan nasional tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, dan bisa mengurangi praktik kolusi serta konflik kepentingan dalam berbagai proyek pembangunan. Selain itu, negara juga harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi saja, tetapi juga memperhatikan pembagian keadilan dan kesejahteraan sosial yang merata di seluruh wilayah. Pemerintah juga harus memperketat pengawasan terhadap peran korporasi dan kelompok elite ekonomi dalam proyek pembangunan nasional agar pembangunan tidak hanya digunakan sebagai cara menumpuk kekayaan oleh kelompok oligarki. Dalam proses pembangunan, penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama dalam mengambil keputusan mengenai pengadaan lahan, pindahnya penduduk, serta penggunaan sumber daya alam. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mengurangi masalah konflik antar orang dan memastikan bahwa proses pembangunan dilakukan secara adil dan mengikuti prinsip demokrasi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan dengan lebih baik. Setiap proyek pembangunan sebaiknya tidak hanya memikirkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan lingkungan secara berkelanjutan serta melindungi masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan nasional bisa berlangsung terus-menerus tanpa menyebabkan kelompok tertentu merasa tertinggal atau diabaikan. Bagi para akademisi dan peneliti, penting untuk terus melanjutkan penelitian tentang hubungan antara negara, oligarki, dan pembangunan nasional agar bisa memperkaya pemahaman mengenai bagaimana kekuasaan bergerak dalam kebijakan publik di Indonesia. Penelitian lanjutan diharapkan bisa membantu memahami lebih dalam bagaimana pengaruh dari kelompok oligarki terhadap proses pembangunan negara serta bagaimana dampaknya terhadap cara kekayaan dan manfaat dibagi kepada masyarakat. Selain itu, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan masyarakat sipil juga sangat penting agar ada pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan pemerintah, sehingga pembangunan nasional bisa lebih mengutamakan kepentingan rakyat umum dibandingkan kepentingan kelompok elite ekonomi-politik tertentu.

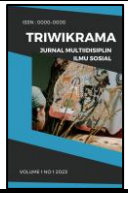

DAFTAR PUSTAKA

Irhamna, K. D. A. I. (2016). *Otonomi daerah dan pembangunan perdesaan*. *13*(726).

Mardhiah, D., Fitriani, E., Baikoeni, E., Sylvia, I., Amri, E., Gautama, M. I., Fahmi, K., Fernandes, R., Ferdyan, R., & Mahesa, R. (n.d.). *Dominasi Oligarki dalam Pembangunan Reklamasi Pantai Utara Jakarta*.

Putri, N. C., & Putri, L. Y. (2024). *ANALISIS PEMBIAYAAN NON-ANGGARAN PEMERINTAH DALAM (Analysis of Non-Government Budget Financing In Supporting Infrastructure*. *6*(2), 91–103.

Rodzi, M. F. (2023). *Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia*. *3*(2), 151–163.

Sunardi, (2020). *RESENSI BUKU OLIGARKI DI INDONESIA : RELASI KAPITAL YANG DOMINAN*. *8*.

Wijaya, H. (2011). *Evolusi Oligarki di Indonesia*. 822–830.